



KERANGKA ACUAN KEGIATAN INOVASI SMART LAYANAN PRIMER PADA UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang No 25 tahun 2019 tentang Pelayanan Publik Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan. Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan; 4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.

Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada, sehingga mampu melayani seluruh masyarakat dengan pelayanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas.

Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer.

Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat yang menitik beratkan pada :

- a. penguatan promotif dan preventif melalui pendekatan pada setiap fase kehidupan;
- b. pendekatan pelayanan kesehatan melalui sistem jejaring pelayanan kesehatan primer;
- c. penguatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa/kelurahan, serta kunjungan keluarga/ kunjungan rumah;

Pusat Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang kesehatan yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan. Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di UPTD Puskesmas Banjarangkan I mencakup diantaranya :

- klaster 1 : Manajemen
- klaster 2 : Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- klaster 3 : Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa dan Lanjut Usia
- klaster 4 : Penanggulangan Penyakit Menular
- klaster 5 : Lintas Klaster

Dalam menyelenggarakan kegiatannya UPTD Puskesmas Banjarangkan I selalu mengacu pada Visi dan Misi. Visi UPTD Puskesmas Banjarangkan I adalah “Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu menuju Kecamatan Banjarangkan sehat yang unggul dan sejahtera”, sedangkan Misi Puskesmas Banjarangkan I untuk mencapai visi tersebut adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat

pertama yang bermutu dan merata, mendorong kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Kesehatan, meningkatkan kualitas SDM Puskesmas, dan mengembangkan sarana dan prasarana yang mengutamakan kualitas pelayanan.

II. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik bahwa dalam rangka pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi, diperlukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (ZI WBK-WBBM) di instansi pemerintah perlu dilaksanakan upaya-upaya perubahan birokrasi dan manajemen pelayanan dengan tujuan menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang lebih cepat dan lebih mudah bagi masyarakat.

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, meminimalkan biaya dan waktu serta memaksimalkan dampak pelayanan terhadap populasi sasaran.

Masih terdapat Pengaduan terkait pelayanan di UPTD Puskesmas Banjarangkan I dari periode Januari sampai dengan Juni 2024 antara lain : lamanya antrian, permintaan dari desa agar petugas turun ke desa, permintaan pelayanan Home Care agar lebih sering, permintaan peningkatan pelayanan puskesmas, permintaan pemantauan jentik dari puskesmas dan permintaan informasi terkait status balita stunting. Dari rincian pengaduan tersebut, maka dapat disimpulkan masih ada pengaduan keluhan terkait lama antrean dan terkait kualitas layanan.

Berdasarkan hasil analisis SWOT UPTD Puskesmas Banjarangkan I maka upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan adalah dengan menyederhanakan pelayanan serta menerapkan teknologi informasi untuk membantu dalam pelaksanaan serta penggunaan anggaran agar lebih efisien. Untuk itu UPTD Puskesmas

Banjarangkan I mengembangkan lagi inovasi SMART LAYANAN PRIMER. SMART LAYANAN PRIMER dilaksanakan dengan konsep memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi yang menunjang proses kegiatan manajemen dan pelayanan puskesmas. Konsep tersebut dilaksanakan di berbagai kegiatan puskesmas dengan selalu mengacu pada VISI, MISI, MOTTO dan TATA NILAI UPTD Puskemas Banjarangkan I.

III. TUJUAN

- 1. Tujuan Umum :
Meningkatkan kualitas pelayanan pada UPTD Puskesmas Banjarangkan I
- 2. Tujuan Khusus :
 - 1) Meningkatkan Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
 - 2) Mempercepat proses pelayanan .
 - 3) Mempermudah akses pelayanan.
 - 4) Memanfaatkan teknologi informasi yang tepat guna dan tepat sasaran.
 - 5) Meningkatkan capaian indicator layanan primer.

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1.	Perencanaan (P1)	a. Pembentukan Tim Inovasi SMART LAYANAN PRIMER
		b. Penyusunan KAK, SOP SMART LAYANAN PRIMER
2.	Pelaksanaan dan Penggerakan (P2)	a. Sosialisasi SMART LAYANAN PRIMER meliputi : 1) SMART ILP 2) SMART-KEPEGAWAIAN 3) SMART-KEUANGAN 4) SMART-Sistem Informasi Puskesmas (SIP) 5) SMART-PELAYANAN
3.	Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian (P3)	a. SMART MONEV
		b. Penyusunan laporan Inovasi SMART LAYANAN PRIMER

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

No	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan
1	Pembentukan Tim Inovasi SMART LAYANAN PRIMER	Penyusunan kelompok kerja untuk melaksanakan kegiatan SMART LAYANAN PRIMER
2	Penyusunan KAK, SOP SMART LAYANAN PRIMER	Pertemuan membahas KAK dan SOP SMART LAYANAN PRIMER
3	Sosialisasi inovasi SMART LAYANAN PRIMER	Pertemuan dengan lintas program dan lintas sector serta sosialisasi kepada pelanggan/ masyarakat baik secara langsung atau melalui media promosi puskesmas.
4	Pelaksanaan SMART-ILP	Memanfaatkan digitalisasi berupa <i>Taplink</i> Register Posyandu Siklus Hidup dan <i>Taplink</i> 14 jenis skrining siklus hidup sebagai upaya agar pencatatan dan pelaporan <i>paperless</i> sehingga lebih efisien.
5	Pelaksanaan SMART-KEPEGAWAIAN	a. Pengaplikasian sistem absensi <i>online</i> berbasis lokasi dan pengenalan wajah yaitu aplikasi Sistem Informasi Presensi Online (SISENSO mobile). b. Penerapan system aplikasi e-jasa dalam pemberian upah kepada tenaga kontrak. c. Penerapan pembagian jasa pelayanan berdasarkan kinerja pegawai secara elektronik
6	Pelaksanaan SMART-KEUANGAN	Penerapan manajemen keuangan BLUD berbasis aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)
7	Pelaksanaan SMART-Sistem Informasi Puskesmas (SIP)	Penerapan pelaporan secara <i>paperless</i> melalui penyimpanan data berbasis <i>cloud computing</i> serta pengolahan dan penyajian data <i>realtime</i> . Serta pemanfaatan Aplikasi Satu Sehat Indonesiaku (ASIK).
8	SMART-PELAYANAN	Sistem SMART-PELAYANAN menggunakan manajemen informasi ataupun aplikasi elektronik (e) yang dikembangkan sendiri atau oleh pihak ketiga meliputi : a. E-antrian online menggunakan aplikasi dan ATM Loker Mandiri b. E-Rekam Medik c. E-Resep d. E-Transaksi e. E-Money f. E-Kepuasan pelanggan

No	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan
		g. Peningkatan akses pelayanan pasien dengan pelaksanaan inovasi Kendalikan Diabetes Melitus dan Hipertensi dengan Pengantaran Obat dan Olahraga (KENDHI TARO). h. Peningkatan akses pelayanan melalui program DORKESMAS yang sangat proaktif dan langsung mendatangi tempat tinggal masyarakat untuk memberikan pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan.
8	SMART MONEV	Melakukan pengumpulan data hasil pelaksanaan kegiatan SMART LAYANAN PRIMER, pembahasan terhadap pencapaian program, mengidentifikasi masalah/ hambatan, melakukan analisis, menyusun rencana tindak lanjut, melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dengan memanfaatkan Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK) dan atau melalui dashboard Satu Sehat.
9	Penyusunan laporan Inovasi SMART LAYANAN PRIMER	Menyusun laporan Inovasi SMART LAYANAN PRIMER

VI. SASARAN

- 1. Meningkatnya Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- 2. Meningkatkan cakupan dan jangkauan intervensi layanan primer

VII. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	PIC	BULAN (TH 2024)					
			Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pembentukan Tim Inovasi SMART LAYANAN PRIMER	Kepala Puskesmas						
2	Penyusunan KAK, SOP SMART LAYANAN PRIMER	Tim SMART LAYANAN PRIMER						
3	Sosialisasi SMART LAYANAN PRIMER	Kepala Puskesmas						
4	SMART-ILP	Ni Komang Herawati, A.Md.Keb dan Putu Rima Asrini, A.Md.Keb						
5	SMART-KEPEGAWAIAN	Pande Putu Oka Ariani,A.Md.Keb						
6	SMART-KEUANGAN	Gusti Ayu Widya Lestari, SE						
7	SMART-Sistem Informasi Puskesmas (SIP)	Putu Rima Asrini, A.Md.Keb						
8	SMART-PELAYANAN	Putu Rima Asrini, A.Md.Keb dr A A A A Manik P. dr A A anom dr Ni Putu Ria K						
9	SMART MONEV	Ketut Trisnayani, SST						
10	Penyusunan laporan SMART LAYANAN PRIMER	Ketut Trisnayani, SST						

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Monitoring terhadap pelaksanaan SMART LAYANAN PRIMER dilakukan setiap bulan sesuai jadwal monitoring. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan SMART LAYANAN PRIMER dilaksanakan setiap 6 bulan. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala Puskesmas disampaikan pada Rapat Minilokakarya dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

Pencatatan, pelaporan serta evaluasi dilaksanakan oleh Tim SMART LAYANAN PRIMER. Pelaporan disampaikan oleh Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan I ke Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung setiap tahun.

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas
Banjarangkan I

dr. I Wayan Agus Arisnawan
NIP. 198608142011011009



Tusan, Nopember 2024
Ketua Tim SMART LAYANAN PRIMER

Ketut Trisnayani, SST., M.M.
NIP. 198211062005012007